

**RENCANA STRATEGIS
BIRO PEREKONOMIAN SETDA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
(REVISI)
2018-2023**

your taxi here

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	5
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	5
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	8
2.3 Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian	19
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	21
3.2 Telaahan Visi, Misi Serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Renstra	23
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	25
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	29
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	30
BAB V. STRATEGIS DAN KEBIJAKAN	32
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII. INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN	46
BAB VIII. PENUTUP	48

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	9
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Menurut Pangkat Golongan Tahun 2020.....	9
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural.....	10
Tabel 2.5 Kondisi Sarana dan Prasarana Biro Perekonomian	11
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat	14
Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	22
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	24
Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Renstra Biro Perekonomian Periode 2013-2018	25
Tabel 3.4 Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat.....	26
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis beserta Faktor penghambat dan Pendorong keberhasilan Penangannya	28
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	30
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan	32
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	39
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.....	46

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur Penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen Perencanaan Perangkat untuk periode 5 (lima) tahun dan Perencanaan Teknis Operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPJMD serta merupakan pengukuran kinerja Perangkat Daerah untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir dan penetapan.

Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat juga dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan Kabupaten/Kota, Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD menjadi acuan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat merumuskan dalam Rancangan Renstra yang akan dituangkan ke dalam Rencana Tahunan terdiri dari (a) Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- g. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- o. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
- p. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
- w. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaga Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
- x. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembantuan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 8; Tambahan Lembaran Daerah No 6).
- y. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023;
- z. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai acuan resmi dan pedoman bagi Biro Perekonomian dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama periode 2018-2023 yang dituangkan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun dan Rencana Kerja Anggaran.

Tujuan disusunnya Renstra Biro Perekonomian setda Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- a. Menjabarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang lebih terukur ke dalam Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program

- dan Kegiatan Tahun 2018-2023 dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023;
- b. Merumuskan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Memberikan dasar dalam Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat baik dalam tahunan maupu lima tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat disusun dengan Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
- 3.4. Telaahan Rencana tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategi

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dibentuk dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat merupakan **Unsur Staf** Perangkat Daerah **Sekretariat Daerah** Provinsi Kalimantan Barat.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat 77 Tahun 2019** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Biro Perekonomian menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah di bidang kebijakan perekonomian, sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan fungsinya penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintah, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi di bidang Daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, BUMD dan BLUD.

Selanjutnya, Susunan Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Kepala Biro;
2. Bagian Kebijakan Perekonomian;
 - a. Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro;
 - b. Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro;
 - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro.
3. Bagian Sumber Daya Alam
 - a. Sub Bagian Sumber Daya Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - b. Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - c. Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Air.
4. Bagian BUMD dan BLUD
 - a. Sub Bagian BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 - b. Sub Bagian BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi;
 - c. Sub Bagian BLUD.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan Tugas dan Fungsi tiap Struktur Bagian sebagai berikut :

1. Bagian Kebijakan Perekonomian

Bagian Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro, dan tata usaha

biro, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi. Fungsi Bagian Kebijakan Perekonomian, yaitu :

- a. **Penyusunan program kerja** Bagian Kebijakan Perekonomian;
- b. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang analisis ekonomi makro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang analisis ekonomi mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **Pelaksanaan kegiatan urusan dan pelayanan** ketatausahaan Biro;
- e. **Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Pengkoordinasian dan fasilitas dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. **Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. **Pembinaan dan pengawasan** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. **Pemberian saran dan pertimbangan** kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. **Pelaksanaan fungsi lain** di bidang analisis ekonomi makro, analisis ekonomi mikro dan tata usaha biro yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

2. Bagian Sumber Daya Alam;

Bagian sumber Daya Alam mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan dan lingkungan hidup, energi dan air, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi. Fungsi Bagian sumber Daya Alam, yaitu :

- a. **Penyusunan program kerja** Bagian Sumber Daya Alam;
- b. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang sumber daya alam pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang sumber daya energi dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Pengkoordinasian dan fasilitas perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. **Pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan provinsi** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. **pembinaan dan pengawasan** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. **Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. **Pelaksanaan fungsi lain** di bidang sumber daya alam yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah

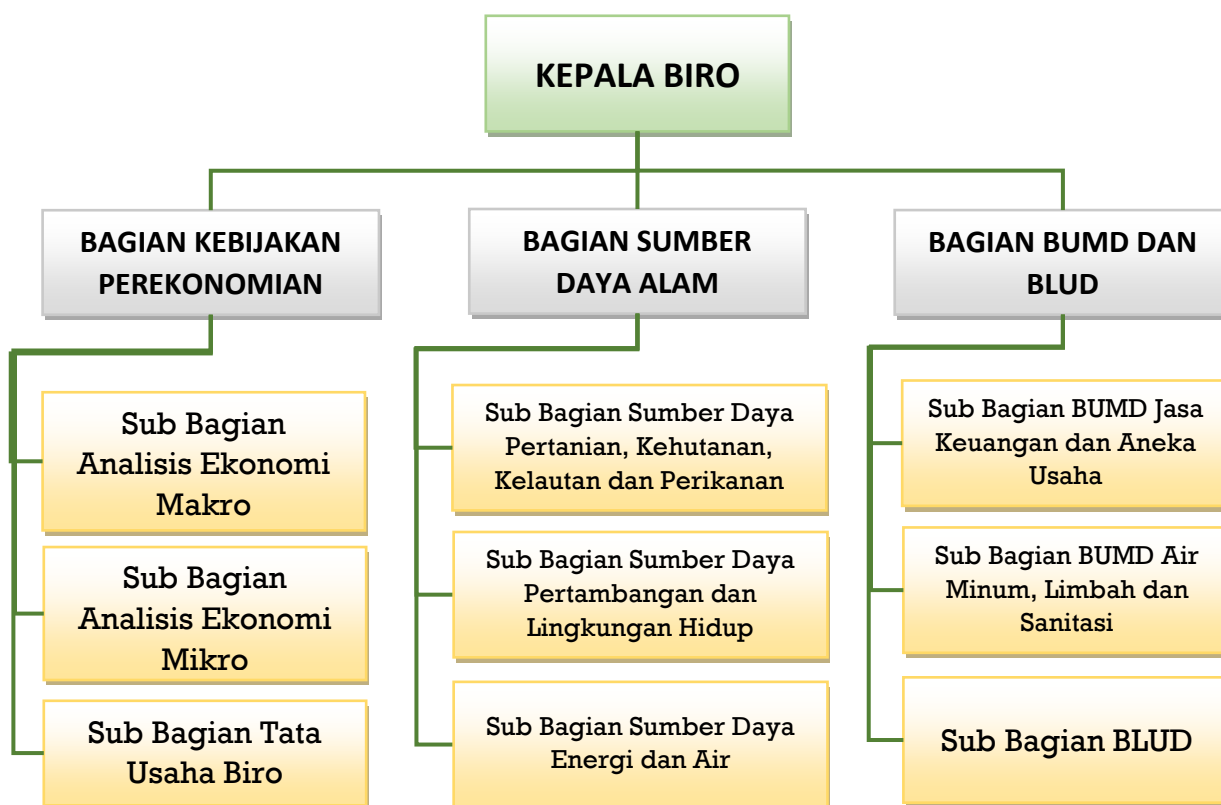
Bagian Sarana Perekonomian Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan, merumuskan, mengkoordinasikan kebijakan pemerintah daerah di bidang Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan serta administrasi. Fungsi Bagian Sarana Perekonomian Daerah, yaitu :

- a. **Penyusunan program kerja** Bagian Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang badan usaha milik daerah, jasa keuangan dan aneka usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang badan usaha milik daerah air minum, limbah dan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. **Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan daerah** di bidang badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. **Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. **Pengkoordinasian dan fasilitasi dengan perangkat daerah terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. **Pelaksanaan kegiatan urusan Pemerintahan Provinsi** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. **Pembinaan dan pengawasan** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. **Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Biro berkenaan dengan tugas dan fungsi** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- j. **Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. **Pelaksanaan fungsi lain** di bidang badan usaha milik daerah dan badan layanan umum daerah yang diserahkan oleh Kepala Biro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, Susunan Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Bagan di bawah ini :

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Kondisi Kepegawaian

Sumber daya aparatur merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang dimiliki mempengaruhi kapasitas pelayanan organisasi.

Berdasarkan kondisi riil pada 2020, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat memiliki **personil** sebanyak **43 orang** yang **berstatus** sebagai **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan **2 orang tenaga honorer** yang bekerja untuk mendukung tugas-tugas perkantoran. Kondisi sumber daya aparatur dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1.
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(per 31 Januari 2020)

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	27
2.	Perempuan	18
	Jumlah	45

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Januari 2020.

Berdasarkan data tersebut di atas menggambarkan bahwa pegawai berjenis kelamin laki-laki di Biro Perekonomian setda Provinsi Kalimantan Barat lebih banyak dibanding pegawai berjenis perempuan sebanyak 17 orang atau sebesar 58,62 % dari 43 orang di tambah dengan tenaga kontak 2 Orang, jumlah total pegawai di Biro perekonomian sebanyak 45 orang.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.
Menurut Pangkat Golongan Tahun 2020

No.	Unit	Pangkat/Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Kepala Biro	1	-	-	-	1
2.	Bagian Kebijakan Perekonomian	1	13	5	1	20
3.	Bagian Sumber Daya Alam	3	8	-	-	11
4.	Bagian BUMD dan BLUD	1	9	1	-	11
	Total	6	30	6	1	43

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Januari 2020.

Jumlah Pegawai di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 43 Orang dengan dominasi pada golongan III sebanyak 30 orang atau 69,77% dari keseluruhan Pegawai di Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, disusul Pegawai Golongan IV sebanyak 6 orang atau sebesar 13,95%, kemudian Pegawai Golongan II sebanyak 6 Orang atau sebesar 13,95% dan Golongan I sebanyak 1 Orang atau sebesar 2,33%.

Peningkatan kinerja organisasi juga ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki aparatur. Peran pendidikan aparatur adalah sebagai pencipta nilai untuk keunggulan kompetitif melalui

penurunan biaya, orientasi pada masyarakat sebagai pelanggan, peningkatan produktivitas dan komitmen kerja.

Berdasarkan data pada tabel 2.3 di bawah ini, terlihat rata-rata tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat per 31 Januari 2020 merupakan tingkat pendidikan dengan **kategori cukup tinggi**.

Tabel. 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Per 31 Januari 2020

No.	Uraian	Jumlah
1.	S3	1 Orang
2.	S2	6 Orang
3.	S1	20 Orang
4.	D4	1 Orang
5.	Sarmud/D3	3 Orang
6.	SLTA	11 Orang
7.	SLTP	- Orang
8.	SD	1 Orang
Jumlah		43 Orang

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Januari 2020.

Berdasarkan Jabatan Struktural, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat memiliki Pejabat Jabatan Pimpinan Pratama 1 orang, 3 orang Jabatan Adminsitrator dan 9 orang jabatan Pengawas, untuk saat ini tidak memiliki Jabatan Fungsional, hal ini dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 2.4.
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan Struktural

No.	Uraian	Jumlah
1.	Jabatan Pimpinan Pratama	1 Orang
2.	Jabatan Administrator	3 Orang
3.	Jabatan Pengawas	9 Orang
Total		13 Orang

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Januari 2020.

Berkenaan dengan itu, apabila melihat Kondisi Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Aset di lingkungan Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Kalimantan Barat maka **cukup signifikan** dengan kelancaran tugas dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat. Tidak dipungkiri bahwa terdapat keterbatasan kualitas dan kuantitas di Sumber Daya Aparatur.

2.2.2. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana perkantoran secara tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi. Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana di Biro Perekonomian setda Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel.2.5.
Kondisi Sarana dan Prasana Biro Perekonomian

No	Jenis Barang	Merk/Model	Bahan	Jumlah	Kondisi
1.	Mobil Dinas	<i>Grand Vitara</i>	Besi	1	Cukup baik
2.	Mobil Dinas	<i>Grand Livina</i>	Besi	1	Cukup baik
2.	Motor Dinas	Yamaha	Besi	2	Cukup baik
3.	Meja Kerja Kepala Biro	-	Kayu	1	Kurang baik
4.	Meja Kerja Kepala Bagian	-	Kayu	3	Cukup baik
5.	Kursi Kerja Kepala Biro	Fantony	Kayu/Busa	1	Cukup baik
6.	Kursi Kerja Kepala Bagian	-	Kayu/Busa	3	Cukup baik
7.	Meja Kerja Kasubbag	-	Kayu	9	Kurang baik
8.	Kursi Kerja Kasubbag	-	Kayu/Busa	9	Kurang baik
9.	Meja Kerja Staf	-	Kayu	14	Kurang baik
10.	Kursi Kerja Staf	-	Kayu/Busa	20	Kurang baik
11.	Filling Cabinet	-	Besi	6	Cukup baik
12.	Lemari Besi	-	Besi	11	Cukup baik
13.	Lemari Kaca	-	Kacar/Kayu	3	Cukup baik
14.	Meja Komputer	-	Kayu	10	Kurang baik
15.	Pesawat Telp		Besi	11	Cukup baik
16.	AC		Besi/Busa	11	Kurang baik
17.	UPS			7	Cukup baik
18.	Komputer			12	Cukup baik
19.	Brankas	-	Besi	2	Cukup baik
20.	Mesin Ketik	-	Besi	3	Cukup baik
21.	Rak Besi	-	Besi	6	Cukup baik

No	Jenis Barang	Merk/Model	Bahan	Jumlah	Kondisi
22.	Jam dinding	-	Plastik	3	Cukup baik
23.	Kipas Angin	-	Plastik	2	Cukup baik
24.	Kursi Tamu	-	Besi/Bahann sofs	3 Set	Cukup baik
25.	Kursi Hadap	Aditech	Kayu	10	Kurang baik
26.	Vacuum Cleaner	-	Besi	1	Cukup Baik

Sumber : Subbagian Tata Usaha Biro, 31 Januari 2020

Berdasarkan tabel 2.5, mengindikasikan bahwa sarana dan prasarana Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat **perlu peningkatan** untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas aparatur di lingkungan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, disamping itu masih perlu didukung dengan adanya **wifi yang lancar** dalam rangka mendukung kegiatan terkait **inovasi berbasis teknologi informasi**.

2.3. Kinerja Pelayanan Biro Perekonomian

Pencapaian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat selama periode lima tahun (2014-2019) dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Indikator Kinerja Biro Perekonomian	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan kelautan, ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	93,52	95,82	96,60	100	75,17	n/a	93,52	95,82	96,60	100	75,17
	Terwujudnya Implementasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Sarana Perekonomian Yang Efisien dan Optimal.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	n/a	100	100	100	100	59,78	n/a	100	100	100	100	59,78

Berdasarkan data Tabel 2.6 di atas, pada Tahun 2013-2016 Biro Perekonomian masih bergabung dengan Biro administrasi Pembangunan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat menjadi Biro Ekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat. Sejak Tahun 2017 Biro Ekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Barat pecah menjadi 2 Biro yaitu Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dan Biro administrasi Pembangunan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Barat. Dapat di lihat pada Tabel 2.6 di atas bahwa realisasi capaian di setiap tahun nye mengalami peningkatan 2-3% pertahun nya, terlihat bahwa capaian Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2014-2018 sangat baik.

Selanjutnya, berdasarkan data Tabel 2.7 dapat dilihat perkembangan pendanaan program di Biro Perekonomian. Rasio antara realisasi dan anggaran pada masing-masing urusan berkisar antara 2,3%. Hal ini menandakan penyerapan anggaran untuk mencapai output tergolong tinggi. Namun jika dilihat per program, rasio realisasi terhadap anggaran mengalami fluktuasi karna terjadi pemekaran Biro pada Tahun 2017 Biro Ekonomi dan Pembangunan menjadi Biro Perekonomian dan Biro Administrasi Barang dan Jasa. Rata-rata anggaran maupun realisasi tiap urusan turun sekitar 3% dikarenakan adanya pemotongan anggaran pada semua OPD. Pertumbuhan anggaran per Tahun tertinggi di Biro Perekonomian pada Urusan Koordinasi dan Monitoring ke Kab/Kota yang ada di Kalimantan Barat. Sedangkan pendanaan kegiatan sangat fluktuatif, tergantung dari banyaknya dan jenisnya keluaran. Penamaan kegiatan juga kadang berubah menyesuaikan dengan evaluasi Gubernur.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Tantangan (*Threats*) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan pengembangan pelayanan , yaitu :

1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi sumberdaya aparatur yang professional di bidangnya ;
2. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Kebijakan di bidang perekonomian;
3. Kurangnya sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi dalam rangka E-Government Bidang Perekonomian;
4. Kurangnya pemahaman para Perencana mengenai Bidang Perekonomian.

Peluang (*Opportunities*) yang dihadapi, yaitu :

1. Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
2. Adanya dukungan Peraturan Perundang-undangan di bidang perekonomian;
3. Adanya Pelaksanaan Kebijakan Satu Data ;
4. Adanya Pengembangan Kerjasama Antar Daerah, antar Kawasan dan Bilateral di bidang perekonomian;

Selanjutnya **Kelemahan (*Weakness*)** di Biro Perekonomian, yaitu :

1. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi terkait kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur di bidangnya yang berbasis Teknologi Informasi;

2. Kurangnya sarana dan prasarana Berbasis Teknologi Informasi Dalam Rangka pelaksanaan E-Government di bidang perekonomian
3. Terbatasnya sarana dan prasarana perkantoran pada Biro Perekonomian;
4. Terbatasnya anggaran Biro Perekonomian ;

Adapun **Kekuatan (Strength)** pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

1. Adanya **Komitmen** yang tinggi dari Pejabat dan Staff di lingkungan Biro Perekonomian;
2. Adanya **Motivasi Kerja** yang tinggi dari Pejabat dan Staff di lingkungan Biro Perekonomian;
3. Adanya **SOP** dalam pelaksanaan kegiatan pada Biro Perekonomian;
4. Adanya **Networking** dengan stakeholder, pemangku kepentingan, Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tabel 2.7
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat
 Provinsi Kalimantan Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata- Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Perumusan Kebijakan Umum Perekonomian dan Pembangunan Daerah	-	2,344,725,000	1,971,653,000	1,929,824,000	-	-	-	2,171,879,256	1,876,314,940	1,832,891,517	-	-	-	91.40	95.90	90.64	-	-	1,041,033,667	980,180,952
Fasilitasi Kebijakan Pemberdayaan dan Kemandirian Pangan serta Ketahanan Pangan Masyarakat Miskin	-	122,393,000	87,347,000	158,033,000	-	-	-	117,814,500	85,585,000	156,869,650	-	-	-	96.28	97.98	99.28	-	-	61,295,500	60,044,858
Fasilitasi Kebijakan Pengembangan di Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	133,017,000	85,281,000	94,948,500	-	-	-	120,305,400	85,200,000	92,219,100	-	-	-	90.44	99.91	97.13	-	-	82,207,750	49,620,750
Fasilitasi Kegiatan Penyuluhan Pertanian	-	122,915,000	120,484,000	-	-	-	-	109,880,400	110,741,700	-	-	-	-	89.40	91.91	-	-	-	48,679,800	44,124,420
Pembinaan Usaha Perkebunan di Kalimantan Barat	-	272,340,000	242,094,700	277,018,500	-	-	-	262,089,980	205,875,800	266,576,000	-	-	-	96.24	85.04	96.23	-	-	131,908,867	122,423,630
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	119,880,000	80,327,000	70,000,000	-	-	-	111,140,400	76,219,200	89,282,300	-	-	-	92.71	94.89	84.69	-	-	45,034,500	41,106,983
Fasilitasi dan Perumusan Kebijakan Pengembangan Bidang Kelautan dan Perikanan	-	60,000,000	54,240,000	90,000,000	-	-	-	50,383,000	50,586,000	84,710,500	-	-	-	83.92	93.26	94.12	-	-	34,040,000	30,941,583
Fasilitasi Pelaksanaan Verifikasi dan Monitoring Evaluasi Hutan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penyelesaian Masalah Kehutanan	-	95,500,000	78,000,000	75,000,000	-	-	-	91,349,000	76,639,600	74,589,000	-	-	-	95.65	98.26	99.45	-	-	41,416,667	40,429,600
Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan Kehutanan dan Lingkungan Hidup	-	194,470,000	149,900,000	150,000,000	-	-	-	193,166,400	147,860,000	149,450,000	-	-	-	99.33	98.64	99.63	-	-	82,395,000	81,746,067
Fasilitasi Kebijakan Pendistribusian dan Penetapan Harga, Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kebijakan Mendukung Perkembangan Usaha di Bidang Pertambangan dan Energi	-	221,285,000	166,000,000	140,000,000	-	-	-	214,744,600	160,523,100	139,237,500	-	-	-	97.04	96.70	99.46	-	-	87,880,833	85,750,867
Kebijakan Gubernur Mengenai Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Barat	-	67,925,000	62,400,000	85,000,000	-	-	-	51,777,500	58,701,000	84,538,200	-	-	-	76.23	94.07	99.46	-	-	35,887,500	32,502,783
Monitoring Penyelenggaraan Sektor Pekerjaan Umum	-	100,000,000	60,987,000	43,638,000	-	-	-	90,628,676	59,385,600	41,683,600	-	-	-	90.63	97.33	95.54	-	-	34,104,167	31,946,313
Fasilitasi Penyelenggaraan Sektor Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monitoring Penyelenggaraan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	100,000,000	65,798,000	69,177,000	-	-	-	70,560,900	64,216,700	66,844,603	-	-	-	70.56	97.60	96.63	-	-	39,162,500	33,603,701
Pokja Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	-	123,000,000	104,038,000	110,613,000	-	-	-	120,674,800	98,384,500	92,574,300	-	-	-	98.11	94.57	83.69	-	-	56,275,167	51,938,933
Sosialisasi Kebijakan Sektor Jasa Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata- Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Fasilitasi Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	-	90,500,000	109,185,000	67,067,000	-	-	-	85,913,300	107,769,000	63,755,000	-	-	-	94.89	98.70	95.08	-	-	44,458,667	42,906,217
Fasilitasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, dan Pariwisata	-	87,000,000	104,779,500	63,076,000	-	-	-	82,999,000	102,963,740	59,362,389	-	-	-	95.40	98.27	94.11	-	-	42,475,917	40,887,522
Koordinasi dan Monitoring Perkembangan Harga Sembako dan Barang-Barang Strategis Lainnya	-	83,000,000	40,500,000	-	-	-	-	75,395,500	39,590,000	-	-	-	-	90.84	97.75	-	-	-	24,700,000	22,997,100
Pengendalian Inflasi Daerah	-	57,500,000	72,680,000	91,200,000	-	-	-	57,309,400	67,114,000	86,900,000	-	-	-	99.87	92.34	95.29	-	-	36,896,667	35,220,567
Fasilitasi, Konsultasi dan Koordinasi kebijakan Bidang Penanaman Modal	-	94,000,000	90,310,000	48,637,000	-	-	-	77,115,000	86,348,200	48,601,931	-	-	-	82.04	95.61	99.99	-	-	38,824,500	35,344,189
Fasilitasi dan Konsultasi Kebijakan bidang Lembaga Keuangan	-	100,000,000	75,054,000	54,416,000	-	-	-	98,562,800	72,987,000	54,288,258	-	-	-	98.56	97.25	99.77	-	-	38,245,000	37,639,676
Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Pengembangan BUMD	-	100,000,000	122,247,800	195,000,000	-	-	-	90,098,700	119,654,800	164,999,186	-	-	-	90.10	97.88	84.61	-	-	69,541,300	62,458,781
Fasilitasi Rekrutmen Direksi BUMD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seleksi Calon Direksi Perusahaan Daerah Aneka usaha Prov. Kalimantan Barat	-	-	-	47,000,000	-	-	-	-	-	46,400,000	-	-	-	-	-	98.72	-	-	11,750,000	11,600,000
Program Bina Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Energi dan Sumberdaya Mineral	-	-	-	-	1,074,490,000	756,279,700	-	-	-	-	883,784,060	568,521,800	-	-	-	-	39.86	27.72	305,128,283	242,050,977
Penyusunan Perumusan Kebijakan Makro Pengembangan Bidang Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	-	-	-	85,990,000	-	-	-	-	-	51,791,000	-	-	-	-	-	60.23	-	14,331,667	8,631,833
Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan	-	-	-	-	200,000,000	123,407,500	-	-	-	-	161,113,000	93,647,600	-	-	-	-	80.56	-	53,901,250	42,460,100
Evaluasi Kebijakan Pengembangan Usaha Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kajian Kebijakan Potensi Pertanian di Daerah Perbatasan	-	-	-	-	36,600,000	-	-	-	-	-	35,351,200	-	-	-	-	-	96.59	-	6,100,000	5,891,867
Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Pupuk Bersubsidi di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Perumusan Kebijakan Kemandirian dan Ketahanan Pangan Masyarakat (HPS Nas, HPS Prov, Gelar Pangan nas, Monev Pelaksanaan Kebijakan)	-	-	-	-	144,000,000	-	-	-	-	-	98,972,700	-	-	-	-	-	68.73	-	24,000,000	16,495,450
Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Penyusunan Kuota)	-	-	-	-	70,000,000	35,820,000	-	-	-	-	64,321,700	19,470,000	-	-	-	-	91.89	-	17,636,667	13,965,283

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata- Rata Pertumbuhan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Kajian Kebijakan Potensi Peternakan Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Kebijakan Makro Bidang Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat	-	-	-	-	85,000,000	-	-	-	-	-	78,854,800	-	-	-	-	-	92.42	-	14,166,667	13,092,467
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Usaha Dalam Kawasan Hutan Kalimantan Barat	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	-	63,632,240	-	-	-	-	-	84.84	-	12,500,000	10,605,373
Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat	-	-	-	-	140,000,000	-	-	-	-	-	127,829,620	-	-	-	-	-	91.31	-	23,333,333	21,304,937
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kalimantan Barat	-	-	-	-	19,150,000	-	-	-	-	-	19,150,000	-	-	-	-	-	100.00	-	3,191,667	3,191,667
Penyusunan Perumusan Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat	-	-	-	-	173,000,000	-	-	-	-	-	149,980,800	-	-	-	-	-	86.69	-	28,833,333	24,996,800
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral Kalimantan Barat	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	19,727,000	-	-	-	-	-	78.91	-	4,166,667	3,287,833
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Energi Kalimantan Barat	-	-	-	-	20,750,000	-	-	-	-	-	13,360,000	-	-	-	-	-	64.39	-	3,458,333	2,226,667
Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura	-	-	-	-	-	44,073,000	-	-	-	-	-	39,871,600	-	-	-	-	90.47	-	7,345,500	6,645,267
Koordinasi perumusan kebijakan bidang ketahanan pangan	-	-	-	-	-	70,453,200	-	-	-	-	-	63,247,000	-	-	-	-	89.77	-	11,742,200	10,541,167
Koordinasi penyusunan perumusan kebijakan bidang perikanan di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	46,871,450	-	-	-	-	-	38,988,000	-	-	-	-	83.18	-	7,811,908	6,498,000
Koordinasi penyusunan perumusan kebijakan bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	27,683,000	-	-	-	-	-	16,744,000	-	-	-	-	60.48	-	4,613,833	2,790,667
Koordinasi penyusunan kebijakan bidang Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	69,695,000	-	-	-	-	-	63,082,000	-	-	-	-	90.51	-	11,615,833	10,513,667
Penyusunan perumusan kebijakan bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	76,550,000	-	-	-	-	-	46,180,000	-	-	-	-	60.33	-	12,758,333	7,696,667
Koordinasi penyusunan perumusan kebijakan pengendalian dampak pencemaran lingkungan	-	-	-	-	-	58,380,000	-	-	-	-	-	47,260,000	-	-	-	-	80.98	-	9,730,000	7,876,667
Penyusunan kebijakan bidang Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	96,267,000	-	-	-	-	-	61,748,000	-	-	-	-	64.14	-	16,044,500	10,291,500
Penyusunan kebijakan energi dan kelistrikan	-	-	-	-	-	107,079,550	-	-	-	-	-	78,282,600	-	-	-	-	73.11	-	17,846,592	13,047,100

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata- Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Bina Sarana Perekonomian Daerah	-	-	-	-	608,270,000	476,651,800	-	-	-	-	502,987,916	284,942,004	-	-	-	-	35.46	21.90	180,820,300	131,321,653
Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Pekerjaan Umum dan Jasa Konstruksi Kalimantan Barat	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-	43,806,800	-	-	-	-	-	87.01	-	8,333,333	7,251,133
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Pekerjaan Umum dan Jasa Konstruksi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Perumusan Kebijakan Sektor Perhubungan Kalimantan Barat	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-	36,324,000	-	-	-	-	-	72.65	-	8,333,333	6,054,000
Penyusunan Perumusan kebijakan Sektor Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat	-	-	-	-	40,000,000	-	-	-	-	-	35,140,300	-	-	-	-	-	87.85	-	6,666,667	5,856,717
Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sektor Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Sanimas, Pamsimas dan PPSP)	-	-	-	-	72,320,000	-	-	-	-	-	49,781,800	-	-	-	-	-	68.84	-	12,053,333	8,296,967
Focus Discussion Group Kajian Kelembagaan Kawasan Ekonomi Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID, Rakor TPID)	-	-	-	-	85,350,000	-	-	-	-	-	79,780,700	-	-	-	-	-	93.47	-	14,225,000	13,296,783
Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Barat	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-	47,669,702	-	-	-	-	-	95.34	-	8,333,333	7,944,950
Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM dan Pariwisata Kalimantan Barat	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-	40,375,000	-	-	-	-	-	80.75	-	8,333,333	6,729,167
Penyusunan Kebijakan Makro di Bidang Perekonomian Daerah Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapat Koordinasi Kinerja Makro Ekonomi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Focus Discussion Group Kajian Kelembagaan Kawasan Industri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2017 dan Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2018	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-	41,649,205	-	-	-	-	-	83.30	-	8,333,333	6,941,534
Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang Penanaman Modal dan Lembaga Keuangan	-	-	-	-	80,000,000	-	-	-	-	-	42,159,435	-	-	-	-	-	84.32	-	8,333,333	7,026,573

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-						Rasio Realisasi antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-						Rata- Rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Evaluasi Pelaksanaan dan Peningkatan <i>Capacity Building BUMD</i>	-	-	-	-	85,600,000	-	-	-	-	-	76,760,974	-	-	-	-	-	89.67	-	14,266,667	12,793,496
Monitoring Penyertaan Modal BUMD	-	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-	-	9,840,000	-	-	-	-	-	39.36	-	4,166,667	1,640,000
Koordinasi penyusunan perumusan kebijakan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	19,890,000	-	-	-	-	-	5,690,000	-	-	-	-	39.36	28.61	3,315,000	948,333
Koordinasi penyusunan perumusan kebijakan bidang Pekerjaan Umum	-	-	-	-	-	29,230,000	-	-	-	-	-	19,448,904	-	-	-	-	-	66.54	4,871,667	3,241,484
Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	35,300,000	-	-	-	-	-	32,172,000	-	-	-	-	-	91.14	5,883,333	5,362,100
Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	59,981,800	-	-	-	-	-	26,583,600	-	-	-	-	-	44.32	9,996,967	4,430,600
Koordinasi penyusunan dan perumusan kebijakan Koperasi, UKM, dan Pariwisata	-	-	-	-	-	36,833,000	-	-	-	-	-	21,273,800	-	-	-	-	-	57.76	6,138,833	3,545,633
Koordinasi penyusunan perusahaan kebijakan bidang Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	-	-	54,094,000	-	-	-	-	-	15,154,000	-	-	-	-	-	28.01	9,015,667	2,825,667
Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	-	-	-	-	-	84,428,000	-	-	-	-	-	44,300,800	-	-	-	-	-	52.47	14,071,333	7,383,467
Koordinasi pengendalian dan pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	-	-	-	-	-	32,375,000	-	-	-	-	-	20,852,900	-	-	-	-	-	64.41	5,395,833	3,475,483
Koordinasi pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	58,060,000	-	-	-	-	-	38,395,400	-	-	-	-	-	66.13	9,676,667	6,399,233
Penyusunan rancangan Perda tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	-	-	-	-	-	66,460,000	-	-	-	-	-	61,070,000	-	-	-	-	-	91.89	11,076,667	10,178,333

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Biro Perekonomian sebagaimana **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 95 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Biro Perekonomian menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dengan fungsinya penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian.

Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Biro Perekonomian masih menghadapi beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pencapaian Program Kegiatan Pembangunan Di Bidang Perekonomian Daerah

Masalah ini disebabkan kurangnya kualitas alat ukur dalam monitoring, evaluasi dan pengendalian Program serta Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah. Hal ini dilatar belakangi oleh standar monitoring, evaluasi dan pengendalian di Bidang Perekonomian belum akuntabel. Disamping itu penyebab masalah ini adalah kurang optimalnya *capacity building* para Sumber Daya Aparatur yang mendukung percepatan pelaksanaan Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta kurang optimalnya partisipasi masyarakat dan kerjasama antar daerah dalam pengembangan perekonomian daerah.

Adapun **faktor** yang mempengaruhi masalah tersebut yaitu komitmen dari para pejabat, *capacity building* sumber daya aparatur, regulasi, kemauan masyarakat dan inisiatif dari Pemerintah Daerah;

2. Belum optimalnya Kualitas Program dan Kegiatan Di Bidang Perekonomian Daerah

Masalah ini disebabkan kurangnya pemahaman dan pengetahuan sumber daya aparatur dalam melakukan penyusunan perencanaan di bidang perekonomian daerah sehingga program tidak optimal mengakomodir kebutuhan daerah di bidang perekonomian. Selanjutnya, kegiatan yang disusun juga lebih banyak bersifat **Belanja Barang dan Jasa**. Faktor yang mempengaruhi adalah keahlian dan keterampilan sumber daya aparatur di bidang perekonomian daerah, kurangnya ketersediaan data dan informasi di bidang perekonomian daerah dalam rangka penyusunan Program dan Kegiatan di bidang perekonomian daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

3. Data dan Informasi Di Bidang Perekonomian Daerah Belum Terintegrasi

Masalah ini disebabkan masih terdapatnya inkonsistensinya data dan informasi terkait bidang perekonomian daerah. Faktor ini disebabkan

adanya perbedaan dalam pengambilan data terkait metode, teknik dan sasaran pengambilan data.

3.2. Telaahan Visi, Misi Serta Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan barat terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

Misi untuk mewujudkan **Visi Pembangunan** tersebut adalah :

1. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-prinsip *Good Governance*;
3. Mewujudkan Kualitas Hidup masyarakat;
4. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera;
5. Mewujudkan Masyarakat Yang Tertib;
6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan.

Terkait Visi dan Misi RPJMD 2018-2023, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagai Unsur Staf Perangkat Daerah Sekretariat Daerah yang merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan dan fasilitasi, pembinaan dan pengawasan, monitoring, evaluasi dan pengendalian serta menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan Provinsi di bidang sumber daya peranian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian daerah.

Berkenaan dengan itu, maka Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan barat terkait erat dengan pencapaian Misi ke-4 yaitu **“Mewujudkan masyarakat Sejahtera”**.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat terhadap pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera	Belum optimalnya Pelaksanaan Kebijakan di bidang perekonomian di Daerah	Kurangnya Kinerja Sumber Daya Aparatur yang Mendukung Pelaksanaan Kebijakan di bidang perekonomian Daerah	Komitmen Yang Tinggi Kepala Daerah, Diklat

No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
a.	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	Masih Rendahnya Kinerja Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	Terdapatnya inkonsistensi Data dan Informasi di Bidang Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	Regulasi dan Kebijakan di Bidang Penanaman modal, Investasi, Keuangan Daerah dan BUMD
b.	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Ketahanan Pangan	Masih Rendahnya Kontribusi Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Kehutanan, Mineral dan Energi Dalam Peningkatan PDRB Kalimantan Barat	Belum Mantapnya Infrastruktur Pendukung serta Masih Rendahnya Kinerja Sumber Daya Aparatur	Regulasi, Komitmen Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah yang Kuat, Teknologi, Diklat
c.	Program Pengendalian Inflasi Daerah dan Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Angka Inflasi Kalimantan Barat Masih Lebih Tinggi dari Kisaran Sasaran Inflasi Nasional dan Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan pelaksanaan Berusaha masih rendah	Masih Rendahnya Pemahaman Pengambil Kebijakan dan kurangnya komitmen pelaksana di Bidang Inflasi, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Regulasi, Dukungan Pemerintah Pusat, Teknologi dan Teknologi Informa
d.	Program Bina Sarana Perekonomian	Masih Rendahnya Kinerja Sarana Perekonomian Daerah Dalam Rangka Penguatan Struktur Ekonomi Kalimantan Barat	Belum Optimalnya Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sarana Perekonomian	Regulasi, Komitmen Kepala Daerah dan Wakil Daerah, Diklat Teknis

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Renstra

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Pada Pemerintah Pusat Kementerian/Lembaga yang memiliki fungsi Koordinator Bidang Perekonomian adalah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai unsur Pemerintahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Daerah memiliki peran penting dalam pembangunan nasional di bidang perekonomian nasional.

Selanjutnya, Kementerian Bidang Perekonomian Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian.

Dengan berpedoman pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Kementerian Bidang Koordinator Bidang Perekonomian telah menyusun rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Visi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2015-2019 adalah “*Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Pembangunan Ekonomi Yang Efektif Dan Berkelanjutan*” .

Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan Visi tersebut, maka diperlukan tindakan nyata dalam bentuk **Misi**, yaitu “*Menjaga Dan Memperbaiki Koordinasi, Sinkronisasi penyusunan Kebijakan, Serta Dalam Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*”

Selanjutnya dari Sasaran Jangka Menengah Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Periode 2015-2019 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2.

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daaerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Sinkronisasi dan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Kurangnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Yang Profesional di Bidang nya	Belum optimalnya ketersediaan data dan Informasi Sumber Daya Aparatur di Bidang nya yang berbasis Teknologi Informasi	Regulasi, Kebijakan Pemerintah Pusat
2	Terwujudnya Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	Belum Optimalnya Sistem Pengendalian Kebijakan di bidang Perekonomian Daerah	Belum Optimalnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung di Bidang Pengendalian Perekonomian Daerah	Regulasi, Komitmen Pemerintah Pusat.
3	Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan Yang baik	Kurangnya Sarana dan Prasarana Berbasis Teknologi Informasi Dalam rangka E-Government Bidang Perekonomian	Terbatasnya Anggaran Pembiayaan Sistem Informasi Teknologi	Regulasi, Teknologi dan Informasi dan

3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat 2013-2018.

Berdasarkan **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat 95 Tahun 2016** tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa Biro Perekonomian menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dengan fungsinya penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas

dan fungsi, monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian.

Visi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018 adalah Menjadikan Biro Perekonomian Yang Mampu Merumuskan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Perekonomian Daerah yang ditindaklanjuti melalui Misi (a) Meningkatkan Pengembangan Kebijakan Perekonomian Kalimantan Barat Melalui Peran Dan Fungsi Strategis Biro Perekonomian; (b) Menyelaraskan Berbagai Rencana Kegiatan dan Keuangan, Meningkatkan Profesionalisma Aparatur Serta Tersedianya Sarana dan Prasarana Kantor.

Selanjutnya, dari Sasaran Renstra Biro Perekonomian tersebut terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Pencapaian Sasaran Renstra Biro Perekonomian Periode 2013-2018

No.	Sasaran Biro Perekonomian	Permasalahan Pelayanan Biro Perekonomian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Terwujudnya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumber Daya Mineral Yang Berkualitas	Kurangnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Yang Profesional di Bidangnyanya	Belum dimanfaatkannya Analisa Jabatan oleh Tim Baperjakat maupun BKD	Regulasi, Kebijakan Pemerintah Pusat
2	Terselenggaranya Kebijakan di Bidang Sarana Perekonomian Daerah termasuk EKonomi Kreatif	Kurangnya kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Aparatur Yang Profesional di Bidangnyanya	Belum dimanfaatkannya Analisa Jabatan oleh Tim Baperjakat maupun BKD	Regulasi, Kebijakan Pemerintah Pusat

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2034 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034. Peraturan Daerah tersebut diarahkan untuk mewujudkan pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan dan keamanan, serta mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sector dan antar wilayah, sehingga pembangunan wilayah di Provinsi Kalimantan barat berdasarkan pada rencana struktur dan pola ruang wilayah.

Tabel 3.4.
Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat

No.	RTRW Terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Biro Perekonomian	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Strategi Pengembangan Fungsi dan Peningkatan Peran Dari Pusat-pusat Kegiatan dan/atau Kawasan Strategis Baik Dalam Lingkup Internal Maupun Eksternal Dengan Memacu Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Intra Wilayah dan Antar Wilayah Secara Terpadu	Belum Optimalnya Ketersediaan data dan Informasi Berbasis Teknologi dan Informasi	Terdapatnya inkonsistensi data dan informasi baik antar Sektor maupun Kabupaten/Kota	Regulasi, Kebijakan dan Komitmen serta Motivasi, Sumber Daya Aparatur
2	Strategi Pengembangan Sistem Infrastruktur Terpadu dan Berhierarki Untuk Mendukung Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan, serta Pengembangan Kawasan Strategis	Belum Optimalnya Perencanaan Terkait Pengembangan Sistem Infrastruktur Terpadu dan Berhierarki Untuk Mendukung Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan, serta Pengembangan Kawasan Strategis	Belum Terintegrasinya Data Terkait Pengembangan Sistem Infrastruktur Terpadu dan Berhierarki Untuk Mendukung Pengembangan Pusat-pusat Pertumbuhan, serta Pengembangan Kawasan Strategis	Regulasi, Kebijakan dan Komitmen serta Motivasi, Sumber Daya Aparatur
3	Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Agribisnis, Industri, dan Pariwisata Sebagai Pendorong Peningkatan daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Didukung Dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Belum Optimalnya Terintegrasinya Perencanaan dan Penganggaran Yang Terintegrasi Untuk Pengembangan Sektor Unggulan Agribisnis, Industri, dan Pariwisata Sebagai Pendorong Peningkatan daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Didukung Dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Belum Terintegrasinya Data Terkait Pengembangan Sektor Unggulan Agribisnis, Industri, dan Pariwisata Sebagai Pendorong Peningkatan daya Saing dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Yang Didukung Dengan Perlindungan Lahan Pertanian	Regulasi, Kebijakan dan Komitmen serta Motivasi, Sumber Daya Aparatur
4	Strategi Pengembangan Kawasan Budidaya Yang Terpadu Sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan	Belum Terintegrasinya Kebijakan Baik Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terdapatnya inkonsistensi Data	Regulasi, Kebijakan dan Komitmen serta Motivasi, Sumber Daya Aparatur

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan “rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan /atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memberikan kontribusi terhadap proses pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil berorientasi pada berkelanjutan dan lingkungan hidup, melalui beberapa spek sebagai berikut :

- a. Identifikasi efek atau pengaruh lingkungan yang akan timbul;
- b. Mempertimbangkan alternative-alternatif yang ada termasuk opsi praktek-praktek pengelolaan lingkungan hidup yang baik;
- c. Antisipasi dan pencegahan terhadap dampak lingkungan pada sumber persoalan;
- d. Peringatan dini atas dampak kumulatif dan resiko global yang akan muncul;
- e. Aplikasi prinsip-prinsip pembangunan Berkelanjutan.

Selaras dengan prinsip KLHS tersebut, Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki *tugas dan fungsi menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah dengan fungsinya penyelenggaraan kegiatan urusan Pemerintah Daerah, pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi , monitoring dan evaluasi di bidang sumber daya pertanian, kelautan dan perikanan, sumber daya alam serta sarana perekonomian* dalam perumusan kebijakan juga memperhatikan **Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis** yang dinilai memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan berpotensi berpengaruh terhadap pencapaian target dan sasaran yang direncanakan. Beberapa hasil yang berupa kebijakan Rencana dan Program (KRP) yang dalam KLHS dinilai memiliki dampak terhadap aspek kajian lingkungan hidup serta isu pembangunan di bidang perekonomian berkelanjutan, yaitu :

Tabel 3.5.
Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No.	Program Yang Dikaji	Analisis Permasalahan Berdasarkan KLHS	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	Implikasi Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
1	Program Pembinaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah harus tetap efisien dan berwawasan lingkungan	Kurangnya peran serta/kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air	Adanya Regulasi dan Standar baku Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Air	Secara Umum Tidak Ada
2	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Pembangunan memperhatikan dan merusak Keanekaragaman Hayati	Kurangnya Komitmen Perusahaan dan Pekebun	Adanya Regulasi dan Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Tingkat Provinsi dan Kabupaten swrta Satgas Tingkat Kecamatan	Secara Umum Tidak Ada
3	Program Pembangunan dan Pengelolaan Hutan	Pembangunan harus memperhatikan dampak dan resiko terhadap lingkungan hidup serta perubahan iklim dan keanekaragaman hayati	Kurangnya peran serta/kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan	Regulasi, Polisi Hutan	Secara Umum Tidak Ada

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis Biro Perekonomian Daerah Setda Provinsi Kalimantan Barat diperoleh dari analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Renstra kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, berdasarkan Analisis SWOT maka ada 3 (tiga) permasalahan inti Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

- a. Masih rendahnya *capacity building* sumber daya aparatur di bidang perekonomian daerah;
- b. Masih terdapatnya inkonsistensi data dan informasi di bidang perekonomian daerah;
- c. Perencanaan Program dan Kegiatan di bidang perekonomian daerah belum mampu menjawab permasalahan ekonomi makro daerah.

Berdasarkan tiga permasalahan inti tersebut dapat dirumuskan 1 (satu) isu strategis, yaitu “ Belum optimalnya Implementasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di bidang perekonomian daerah”

BAB IV**TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dan Sasaran merupakan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam lima tahun mendatang sebagaimana tertuang dalam tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat		Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang meningkat	5,28%	5,39%	5,40%	5,51%	5,62%
			Terkendalnya Inflasi Daerah	3,60%	3,52%	3,47%	3,41%	3,36%
		Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal	75 %	79%	83%	87%	93%
			Persentase Kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	75 %	79%	83%	87%	93%
			Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor BUMD	75 %	83%	90%	95%	100%
		Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Kehutanan dan Mineral serta Kebijakan Bidang Energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatnya Lingkungan Hidup	Persentase terlaksananya kebijakan Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam dan Kehutanan yang Ditindaklanjuti	68%	75%	83%	91%	100%
			Persentase Terlaksananya Kebijakan Sektor Mineral dan energi yang Ditindaklanjuti	68%	75%	83%	91%	100%
			Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kelistrikan dan Gas yang Ditindaklanjuti	68%	75%	83%	91%	100%
			Persentase Kebijakan di Sektor Kehutanan yang Ditindaklanjuti	68%	75%	83%	91%	100%
			Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	70%	77%	85%	94%	100%
			Persentase Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan Yang Ditindaklanjuti	75%	77%	85%	95%	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi Daerah	75%	83%	90%	95%	100%
			Persentase Terlaksananya Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	40%	45%	50%	55%	61%
			Persentase Dokumen Pertimbangan Kebijakan Penyelesaian Persoalan Pelaksanaan Berusaha	48%	53%	58%	65%	72%
	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program Sarana Perekonomian	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti	60 %	66 %	73%	80%	88%	
		Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perindustrian Yang Ditindaklanjuti	45%	50%	55%	61%	67%	
		Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Koperasi Yang Ditindaklanjuti	60 %	66%	73%	80%	88%	
		Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Yang Ditindaklanjuti	75%	83%	90%	95%	100%	
		Persentase Terlaksananya di Sektor Pariwisata yang Ditindaklanjuti	30%	33%	36%	40%	45%	
		Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Fisik Yang Ditindaklanjuti	40%	45%	50%	55%	61%	
		Persentase Terlaksananya Kebijakan Perhubungan Yang Ditindaklanjuti	30%	33%	36%	40%	45%	
		Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Komunikasi Yang Ditindaklanjuti	30%	33%	36%	40%	45%	

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Selanjutnya, strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari Visi dan Misi yang diemban Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan		
Misi :	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	Penguatan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan dan BUMD melalui Sistem Terintegrasi yang mendorong Iklim Investasi Yang Kondusif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sistem Satu Data dan Informasi Terintegrasi untuk Mengembangkan Daya Saing Daerah dan Promosi Potensi Daerah; 2. Penguatan Sistem Koordinasi, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi di bidang Lembaga Keuangan Daerah Penguatan Manajemen dan <i>Capacity Building</i> SDM BUMD
	Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Kehutanan dan Mineral serta Kebijakan Bidang Energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatnya Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Kelistrikan, Energi, BBM dan Gas; 2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Berkelanjutan Berbasis Masyarakat; 3. Penguatan Ketersediaan Pangan Strategis Berbasis Sumber Daya Lokal dan Kelancaran Distribusi Pangan Berbasis Teknologi Informasi; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sistem Koordinasi, Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kelistrikan, Energi dan Gas; 2. Penguatan Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup Berbasis Masyarakat dan Pengamanan Perlindungan Sumber Daya Alam Melalui Rehabilitasi Lahan Kristis serta Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Hutan Berbasis Masyarakat;

Visi :	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan		
Misi :	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
		4. Penguatan Sistem Perekonomian di Bidang Sumber Daya Pertanian, Alam, Mineral dan Kehutanan Yang Berkelanjutan	3. Peningkatan Sistem Ketersediaan Pangan Melalui Cadangan Pangan, Akses Pangan dan Konsumsi Pangan Berbasis Masyarakat Lokal dan Informasi Teknologi serta Peningkatan <i>Capacity Building</i> Para Penyuluh di Bidang Pertanian, Kehutanan Berserta Penguatan Kelembagaannya dengan Mengembangkan Kartu Tani. 4. Pengembangan Agrobisnis dan Agro Industri di Bidang Pertanian Sumber Daya Alam, dan Kehutanan yang berkelanjutan dengan memanfaatkan Sumber Daya Lokal Sebagai Sumber Daya Perekonomian; 5. Peningkatan Sistem Pengelolaan Sumber Daya Mineral Berbasis Masyarakat.
	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program Sarana Perekonomian	Peningkatan Kinerja Sarana Perekonomian Kerakyatan dan Ekonomi Syariah	1. Penguatan Kebijakan Struktur Industri Daerah Melalui Peningkatan Pengembangan Industri Yang Mengolah Komoditi Utama Daerah, Peningkatan tumbuhnya Industri Peralatan dan Pengembangan Sektor Primer dan IKM Unggulan Provinsi; 2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Kelembagaan UMKM Berbasis Teknologi Tepat Guna dan Mengoptimalkan Peran Perbankan terutama Bank Kalbar Dalam Rangka Penyaluran Pembiayaan Bagi UMKM Serta Mendorong Bumdes Untuk Mengembangkan UMKM maupun Koperasi;

Visi :	Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan		
Misi :	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
			<p>3. Peningkatan Industri dan Investasi Berbasis Kreativitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif;</p> <p>4. Peningkatan Industri dan Investasi di bidang Pariwisata Berbasis Unggulan Alam dan Budaya Serta Melakukan Promosi Destinasi Wisata melalui Teknologi Informasi;</p> <p>5. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Dasar, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Kominfo) serta Pengembangan Aksebilitas Masyarakat Terhadap Layanan Kominfo di Wilayah Pedalaman, Perbatasan dan Pulau Terdepan serta Terluar.</p>
	Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	Penguatan TPID Provinsi, Kabupaten dan Kota, Percepatan Akses Keuangan Daerah Melalui Bumdes dan Desa Berbasis Teknologi Keuangan dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Berbasis Teknologi Informasi	Pengembangan Sistem Pengendalian Inflasi Daerah Berbasis TPID Pedesaan dan Teknologi Informasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat maka Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja Program Serta Kerangka Pendanaan tertuang dalam tabel 6.1 di bawah ini. (terlampir)

Rencana Program dan Kegiatan tersebut mencakup Program dan Kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap perangkat daerah. Program Kegiatan Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yaitu **Pertama, Program Umum** yang dipergunakan untuk mengoperasionalkan pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana perkantoran dan sumber daya aparatur. **Kedua, Program Khusus** yang diarahkan untuk mengoperasionalkan target khusus untuk mendukung tercapainya target rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

A. Program Umum

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Kegiatan, yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah;
 - b. Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
 - c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - d. Penyediaan Barang cetak dan Penggadaan;
 - e. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - f. Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah;
 - g. Penataan dan Pemeliharaan Arsip.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kegiatan, yaitu :
 - a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional;
 - b. Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/Kipas Angin;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Peralatan Kantor;
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur
Kegiatan, yaitu :
 - a. Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop;
 - c. Penyusunan Penetapan Kinerja.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
Kegiatan, yaitu :
 - a. Penyusunan Laporan Keuangan;
 - b. Penyusunan LAKIP;
 - c. Penyusunan RENSTRA;
 - d. Penyusunan RENJA SKPD;
 - e. Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ;

- f. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
 - g. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD;
 - h. Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
5. Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
- Kegiatan**, yaitu :
- a. Penyusunan/Pelaporan Inventarisasi Aset.

B. Program Khusus (Program Kebijakan Pemerintah)

1. *Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD.*
- Kegiatan**, yaitu :
- a. Percepatan Investasi dan Pembinaan Lembaga Keuangan Daerah di Kalimantan Barat;
 - b. Monitoring dan Evaluasi BUMD Provinsi Kalimantan Barat;
 - c. Workshop Penguatan *Capacity Building* BUMD se-Kalimantan Barat;
 - d. Fasilitasi Penetapan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
 - e. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
 - f. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (**Workshop Penguatan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Se-Kalimantan Barat**);
 - g. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (**Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat**);
 - h. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (**Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah se-Kalimantan Barat**);
 - i. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (**Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah**);
 - j. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (**Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) se-Kalimantan Barat**);
 - k. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (**Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Badan Layanan Umum Daerah**);
2. *Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Serta Ketahanan Pangan.*
- Kegiatan**, yaitu :
- a. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat;
 - b. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Perkebunan di Kalimantan Barat;
 - c. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat;
 - d. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat;
 - e. Fasilitasi Percepatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat;
 - f. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat;
 - g. Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat;

- h. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat;
 - i. Fasilitasi Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat;
 - j. Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat;
 - k. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat;
 - l. Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat;
 - m. Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan di Kalimantan Barat;
 - n. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan kebijakan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat;
 - o. Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan;
 - p. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pangan di Kalimantan Barat;
 - q. Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Peningkatan IKLH di Kalimantan Barat;
 - r. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat;
 - s. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat;
 - t. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan dan Evaluasi Penyediaan bahan bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat;
 - u. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat.
 - v. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
 - w. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
 - x. Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air;
3. *Program Bina Sarana Perekonomian Daerah*
- Kegiatan**, yaitu :
- a. Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Infrastruktur (Perhubungan, Kominfo, dan Pekerjaan Umum);
 - b. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Perhubungan, Kominfo dan Pekerjaan Umum;
 - c. Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat;
 - d. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kalimantan Barat;
 - e. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Perindustrian (Hilirisasi dan Kawasan Industri) dan Perdagangan di Kalimantan Barat;
 - f. Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Koperasi, UMKM, Pariwisata, Perindag dan Ekonomi Kreatif;
 - g. Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat.
 - h. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro;
 - i. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Mikro;
 - j. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Mikro (**Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama bidang perekonomian regional dan sub regional**);
 - k. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Mikro (**Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perekonomian kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perbatasan dan kawasan strategis Nasional**);

4. *Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha.*

Kegiatan, yaitu :

- a. Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat;
- b. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat Lintas Kabupaten di Kalimantan Barat dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah;
- c. Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat;
- d. Fasilitasi Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam Rangka Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi untuk mendukung Desa Mandiri di Kalimantan Barat;
- e. Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat.
- f. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro (**Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah**);
- g. Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro (**Koordinasi dan sinkronisasi percepatan akses keuangan daerah dan percepatan pelaksanaan berusaha**);

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Tahun Awal 2018	Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi						
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat	Peningkatan Dibidang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral	3.00.3.00.00.06.1 5	Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral	Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi																						
				Terkendalinya Inflasi Daerah			5.28%	5.28%		5.39%	5.40%		5.51%	5.62%		5.62%										
							3.60%	3.60%		3.52%	3.47%		3.41%	3.36%		3.36%										
										75%	1,061,855,000															
						3.00.3.00.00.06.1 5.01	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Perkebunan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan dan Pembinaan Usaha Perkebunan	Jumlah Dokumen		7 Kab	172,770,000														
						3.00.3.00.00.06.1 5.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Dokumen Laporan	Jumlah Dokumen		6 Kab	74,120,000														
						3.00.3.00.00.06.1 5.03	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Peternakan dan kesehatan Hewan	Jumlah Dokumen		7 Kab/Kota	60,000,000														
						3.00.3.00.00.06.1 5.05	Koordinasi Perumusan Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan	Jumlah Dokumen Laporan	Jumlah Dokumen		9 Kab/Kota	105,650,000														
						3.00.3.00.00.06.1 5.07	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen		6 Kab/Kota	60,185,000														
						3.00.3.00.00.06.1 5.08	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen		6 Kab/Kota	40,350,000														
						3.00.3.00.00.06.1 5.09	Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen		11 Kab/Kota	100,000,000														
						3.00.3.00.00.06.1 5.10	Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	Terlaksananya Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Kehutanan	Jumlah Dokumen		8 kab	105,000,000														
						3.00.3.00.00.06.1 5.11	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan perumusan Kebijakan Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan	Jumlah Dokumen		4 Kab	80,000,000														
		3.00.3.00.00.06.1 5.12	Penyusunan Kebijakan Bidnag Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penyusunanna Kebijakan Bidang Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen		12 Kab/Kota	125,590,000																		
		3.00.3.00.00.06.1 5.13	Penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	Terlaksananya penyusunan Kebijakan Energi dan Kelistrikan	Jumlah Dokumen		12 Kab/Kota	138,190,000																		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Tahun Awal 2018	Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
	Terwujudnya Peningkatan Sarana Perekonomian Daerah	3.00.3.00.00.06.1 6	Program Bina Sarana Perekonomian Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah Kalimantan Barat			60%	781,488,000														
		3.00.3.00.00.06.1 6.01	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Kebijakan Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen		6 Kab/Kota	58,020,000														
		3.00.3.00.00.06.1 6.02	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen		5 kab	49,000,000														
		3.00.3.00.00.06.1 6.03	Koordinasi Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen		6 Kab/Kota	58,000,000														
		3.00.3.00.00.06.1 6.04	Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Tim Percepatan Akses keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen		5 Kab/Kota	90,000,000														
		3.00.3.00.00.06.1 6.05	Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Perumusan Kebijakan Koperasi, UKM dan Pariwisata	Jumlah Dokumen		3 Kab	63,757,000														
		3.00.3.00.00.06.1 6.06	Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perumusan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen		5 Kab/Kota	93,034,000														
		3.00.3.00.00.06.1 6.07	Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah Dokumen		8 Kab/Kota	130,857,000														
		3.00.3.00.00.06.1 6.08	Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan lembaga Keuangan dan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen		5 Kab/Kota	69,120,000														
		3.00.3.00.00.06.1 6.09	Koordinasi Pengembangan BUMD di Kalimantan Barat	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian BUMD di Kalimantan Barat	Jumlah Dokumen		7 Kab/Kota	79,800,000														
		3.00.3.00.00.06.1 6.10	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha	Jumlah Dokumen		1 Raperda	89,900,000														
	Terwujudnya Peningkatan Nilai Investasi	4.1.1.13	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal	%				79%			83%		87%		93%		93%				
				% Kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD					79%	273,722,300		83%	251,671,730	87%	276,838,903		93%	304,522,793	93%	304,522,793	Biro Perekonomian	Prov dan Kabupaten/Kota di Kalbar
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor BUMD					83%			90%		95%		100%		100%				
		01	Sinkronisasi penanaman modal dan lembaga keuangan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen laporan	Jumlah dokumen				1 Dok	76,974,300	1 Dok	84,671,730	1 Dok	93,138,903	1 Dok	102,452,793	1 Dok	102,452,793	Subbag BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			
		02	Monitoring dan Evaluasi BUMD Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 Dok	89,166,800	1 Dok	98,000,000	1 Dok	107,800,000	1 Dok	118,580,000	1 Dok	118,580,000				
		03	Penguatan BUMD se-Kalimantan Barat	Orang	orang				50 Org	62,581,200	50 Org	69,000,000	50 Org	75,900,000	50 Org	83,490,000	50 Org	83,490,000				
		04	Penyusunan Perda tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 Dok	45,000,000												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Tahun Awal 2018	Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						1 Dok	99,364,400	1 Dok	110,000,000	1 Dok	121,000,000	1 Dok	121,000,000		
		06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Workshop Penguatan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha Se-Kalimantan Barat)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						1 Dok	61,232,100	1 Dok	68,000,000	1 Dok	74,800,000	1 Dok	74,800,000		
		07	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD Jasa Keuangan dan Aneka Usaha (Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						1 Dok	80,938,600	1 Dok	90,000,000	1 Dok	99,000,000	1 Dok	99,000,000		
		08	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Badan Usaha Milik Daerah)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen			1 Dok	74,616,400	1 Dok	69,215,100	1 Dok	76,000,000	1 Dok	83,600,000	1 Dok	83,600,000	Subbag BUMD Air Minum, Limbah dan Sanitasi		
		09	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi (Rapat Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah se-Kalimantan Barat)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						1 Dok	45,143,300	1 Dok	49,500,000	1 Dok	54,450,000	1 Dok	54,450,000		
		10	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Badan Layanan Umum Daerah)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen			1 Dok	74,893,000	1 Dok	69,215,100	1 Dok	76,000,000	1 Dok	83,600,000	1 Dok	83,600,000	Subbag BLUD		
		11	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Rapat Koordinasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) se-Kalimantan Barat)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						1 Dok	42,593,300	1 Dok	49,500,000	1 Dok	54,450,000	1 Dok	54,450,000		
	Terwujudnya Peningkatan PDRB Kalimantan Barat dari Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Kehutanan dan Mineral serta Kebijakan Bidang Energi dan Kelistrikan, Bahan Bakar Minyak dan Gas Kemandirian Pangan dan Meningkatkan Lingkungan Hidup	4.1.125	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Ketahanan Pangan	% Terlaksananya Kebijakan Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam yang Di tindaklanjuti				75%		83%			91%		100%		100%			
				% Terlaksananya Kebijakan Sektor Mineral dan Energi yang Ditindaklanjuti				75%		83%			91%		100%		100%			
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kelistrikan dan Gas yang Ditindaklanjuti				75%	1,346,041,000	83%	2,367,703,200		91%	2,445,388,000	100%	2,530,826,800	100%	2,530,826,800	Biro Perekonomian	Prov dan Kabupaten/Kota di Kalbar
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kehutanan yang Ditindaklanjuti				75%		83%			91%		100%		100%			
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti				77%		85%			94%		100%		100%			
				% Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan Yang Ditindaklanjuti				77%		85%			95%		100%		100%			
		01	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen			1 dok	34,709,800	1 dok	40,000,000	1 dok	40,000,000	1 dok	40,000,000	1 dok	40,000,000	Subbagian SD Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Prov dan Kabupaten/Kota di Kalbar	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Tahun Awal 2018	Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		02	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	64,383,900	1 dok	70,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	70,000,000	1 dok	70,000,000		
		03	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	58,984,000	1 dok	66,000,000	1 dok	66,000,000	1 dok	66,000,000	1 dok	66,000,000		
		04	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan dan Program Perkebunan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	49,884,700	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000		
		05	Fasilitasi Percepatan Pembangunan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	65,418,600	1 dok	75,000,000	1 dok	75,000,000	1 dok	75,000,000	1 dok	75,000,000		
		06	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan di Bidang Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	49,927,600	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000		
		07	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	66,165,900	1 dok	73,000,000	1 dok	73,000,000	1 dok	73,000,000	1 dok	73,000,000		
		08	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Peternakan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	48,492,300	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000		
		09	Penyusunan Bahan Kebijakan Bidang Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	64,935,900	1 dok	73,000,000	1 dok	73,000,000	1 dok	73,000,000	1 dok	73,000,000		
		10	Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Perhutanan Sosial di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	59,709,200	1 dok	66,000,000	1 dok	66,000,000	1 dok	66,000,000	1 dok	66,000,000		
		11	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kehutanan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	84,153,200	1 dok	96,000,000	1 dok	96,000,000	1 dok	96,000,000	1 dok	96,000,000		
		12	Sinkronisasi Program Ketahanan Pangan di Kalimantan Barat Menuju Desa Swasembada Mandiri Pangan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	74,148,900	1 dok	83,000,000	1 dok	83,000,000	1 dok	83,000,000	1 dok	83,000,000		
		13	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pangan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	49,990,500	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000		
		14	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						3 dok	469,080,000	3 dok	515,988,000	3 dok	567,586,800	3 dok	567,586,800		
		15	Sinergisitas Percepatan Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	70,633,400	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	Subbagian Sumber Daya Energi dan Air	Prov dan Kabupaten/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Tahun Awal 2018	Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target 10	Rp. 11	Target 12	Rp. 13	Target 14	Rp. 15	Target 16	Rp. 17	Target 18	Rp. 19	Target 20	Rp. 21		
1		3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		16	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sumber Daya Mineral dan Air Tanah di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	71,422,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000		
		17	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	81,539,800	1 dok	91,000,000	1 dok	91,000,000	1 dok	91,000,000	1 dok	91,000,000		
		18	Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kelistrikan dan Evaluasi Penyediaan Bahan Bakar Minyak dan Gas di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	78,983,400	1 dok	88,000,000	1 dok	88,000,000	1 dok	88,000,000	1 dok	88,000,000		
		19	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Kelistrikan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	63,809,800	1 dok	72,000,000	1 dok	72,000,000	1 dok	72,000,000	1 dok	72,000,000		
		20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						2 dok	307,623,200	2 dok	338,400,000	2 dok	372,240,000	2 dok	372,240,000		
		21	Pembinaan dan Pengawasan Kebijakan di Bidang Pertambangan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	70,336,400	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	Subbagian SD Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Prov dan Kabupaten/Kota
		22	Sinergisitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup dalam rangka Peningkatan IKLH di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	79,327,700	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000		
		23	Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Lingkungan Hidup di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	59,084,000	1 dok	65,000,000	1 dok	65,000,000	1 dok	65,000,000	1 dok	65,000,000		
		24	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						2 dok	65,000,000	2 dok	65,000,000	2 dok	65,000,000	2 dok	65,000,000		
	Terwujudnya Peningkatan Kinerja Program Sarana Perekonomian	4.1.16.2	Program Bina Sarana Perekonomian	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti	%				66%		73%		80%		88%		88%			
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perindustrian Yang Ditindaklanjuti					50%		55%		61%		67%		67%			
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Koperasi Yang Ditindaklanjuti					66%		73%		80%		88%		88%			
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Yang Ditindaklanjuti					83%	406,818,000	90%	1,420,300,800	95%	1,517,000,000	100%	1,622,900,000	100%	1,622,900,000	Biro Perekonomian	Prov dan Kabupaten/Kota
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Pariwisata Yang Ditindaklanjuti					33%		36%		40%		45%		45%			
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Fisik Yang Ditindaklanjuti					45%		50%		55%		61%		61%			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Tahun Awal 2018	Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				% Terlaksananya Kebijakan Perhubungan Yang Ditindaklanjuti					33%		36%		40%		45%		45%			
				% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Komunikasi Yang Ditindaklanjuti					33%		36%		40%		45%		45%			
		01	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Infrastruktur (Perhubungan, Kominfo, dan Pekerjaan Umum)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	74,616,400	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	Sub Bagian Analisis Ekonomi Mikro	Prov dan Kabupaten/Kota
		02	Sinkronisasi Percepatan Pembangunan di Bidang Koperasi, UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	79,514,000	1 dok	88,000,000	1 dok	88,000,000	1 dok	88,000,000	1 dok	88,000,000		
		03	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	98,770,900	1 dok	108,000,000	1 dok	108,000,000	1 dok	108,000,000	1 dok	108,000,000		
		04	Percepatan Pembangunan Perindustrian (Hilirisasi dan Kawasan Industri) dan Perdagangan di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	79,999,100	1 dok	88,000,000	1 dok	88,000,000	1 dok	88,000,000	1 dok	88,000,000		
		05	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Mikro	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						2 dok	353,195,600	2 dok	388,000,000	2 dok	426,800,000	2 dok	426,800,000		
		06	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Mikro (Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kerjasama bidang perekonomian regional dan sub regional)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						1 dok	106,283,300	1 dok	117,000,000	1 dok	128,700,000	1 dok	128,700,000		
		07	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Perekonomian Mikro (Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang perekonomian kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan perbatasan dan kawasan strategis Nasional)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						1 dok	85,083,100	1 dok	94,000,000	1 dok	103,400,000	1 dok	103,400,000		
		08	Penyusunan Analisa Makro Perekonomian Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	73,917,600	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	1 dok	87,000,000	Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro	
		09	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						3 dok	417,738,800	3 dok	460,000,000	3 dok	506,000,000	3 dok	506,000,000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (ouput)	Satuan	Tahun Awal 2018	Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Tahun 2023		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Terwujudnya Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	4.1.15.3	Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi Daerah % Terlaksananya Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah % Dokumen Pertimbangan Kebijakan Penyelesaian Persoalan Pelaksanaan Berusaha	%				83%	365,697,500	90%	1,002,225,800	95%	1,061,000,000	100%	1,126,400,000	100%	1,126,400,000	Biro Perekonomian	Prov dan Kab/Kota
		01	Pengendalian Inflasi daerah di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	99,880,400	1 dok	110,000,000	1 dok	110,000,000	1 dok	110,000,000	1 dok	110,000,000	Sub Bagian Analisis Ekonomi Makro	Prov dan Kabupaten/Kota
		02	Percepatan Pembangunan Pasar Rakyat Lintas Kabupaten di Kalimantan Barat dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	49,560,200	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000		
		03	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	69,297,400	1 dok	77,000,000	1 dok	77,000,000	1 dok	77,000,000	1 dok	77,000,000		
		04	Fasilitasi Percepatan Akses Keuangan Daerah dalam rangka Peningkatan Indeks Ketahanan Ekonomi untuk mendukung Desa Mandiri di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	98,185,500	1 dok	110,000,000	1 dok	110,000,000	1 dok	110,000,000	1 dok	110,000,000		
		05	Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Kalimantan Barat	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen				1 dok	48,774,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000	1 dok	55,000,000		
		06	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro (Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						4 dok	282,285,900	4 dok	310,000,000	4 dok	341,000,000	4 dok	341,000,000		
		07	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Makro (Koordinasi dan sinkronisasi percepatan akses keuangan daerah dan percepatan pelaksanaan berusaha)	Jumlah dokumen	Jumlah dokumen						2 dok	312,939,900	2 dok	344,000,000	2 dok	378,400,000	2 dok	378,400,000		

BAB VII**INDIKATOR KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG PEREKONOMIAN**

Berikut ditampilkan Indikator Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023.

Indikator Kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada tujuan:

Table 7.1.
Indikator Kinerja
Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
		Tahun	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal	70 %	75 %	79%	83%	87%	93%	93%
2	Persentase Kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	70 %	75 %	79%	83%	87%	935%	93%
3	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor BUMD	70 %	75 %	83%	90%	95%	100%	100%
4	Persentase terlaksananya kebijakan Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	68%	68%	75%	83%	91%	100%	100%
5	Persentase Terlaksananya Kebijakan Sektor Mineral dan energi yang Ditindaklanjuti	68%	68%	75%	83%	91%	100%	100%
6	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kelistrikan dan Gas yang Ditindaklanjuti	68%	68%	75%	83%	91%	100%	100%
7	Persentase Kebijakan di Sektor Kehutanan yang Ditindaklanjuti	68%	68%	75%	83%	91%	100%	100%
8	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	70%	70%	77%	85%	94%	100%	100%
9	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan Yang Ditindaklanjuti	75%	75%	77%	85%	95%	100%	100%
10	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi	75 %	75 %	83 %	90%	95%	100%	100%

No	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD
		Tahun	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Daerah							
11	Persentase Terlaksananya Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah	40%	40 %	45%	50%	55%	61%	61%
12	Persentase Dokumen Pertimbangan Kebijakan Penyelesaian Persoalan Pelaksanaan Berusaha	48 %	48 %	53%	58%	65%	72%	72%
13	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti	60%	60 %	66%	73%	80%	88%	88%
14	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perindustrian Yang Ditindaklanjuti	45%	45%	50%	55%	61%	67%	67%
15	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Koperasi Yang Ditindaklanjuti	60%	60%	66%	73%	80%	88%	88%
16	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Yang Ditindaklanjuti	75%	75%	83%	90%	95%	100%	100%
17	Persentase Terlaksananya di Sektor Pariwisata yang Ditindaklanjuti	30%	30%	33%	36%	40%	45%	45%
18	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Fisik Yang Ditindaklanjuti	40%	40%	45%	50%	55%	61%	61%
19	Persentase Terlaksananya Kebijakan Perhubungan Yang Ditindaklanjuti	30%	30%	33%	36%	40%	45%	45%
20	Persentase Terlaksananya Kebijakan di Sektor Komunikasi Yang Ditindaklanjuti	30%	30%	33%	36%	40%	45%	45%

BAB VIII

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Revisi) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 memuat Visi dan Misi, Tujuan, Sasaran Kebijakan, Program dan Kegiatan yang merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat, dan diharapkan Renstra ini dapat menjadi komitmen dan kesatuan langkah dalam menentukan arah dan peran Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

Selanjutnya dokumen Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat untuk mewujudkan visi dan misi Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, Februari 2020
Kepala Biro Perekonomian,

Dr. Herkulana Mekarryani S., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660309 198603 2 012